

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN UTAMA
BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK**



Disusun oleh :

HAGNI KUMBORO BHAKTI

NPM : 04 05 08751
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN
CUKAI TANJUNG PRIOK**



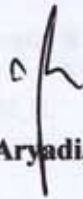
Diajukan oleh :

Hagni kumboro Bhakti

NPM : 04 05 08751
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Oktober 2012**

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN
CUKAI TANJUNG PRIOK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 November 2012
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkah dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok”. Penulisan hukum ini diajukan dengan tujuan utama untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Y . Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan yang terbaik bagi penulis
3. G. Aryadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang juga telah memberikan arahan yang sangat baik bagi penulis
4. Bpk Aris Kunchahyo beserta tim penyidik KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok
5. Keluarga penulis Papah Mamah dan Adik-adikku, terima kasih atas dukungannya selama ini
6. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu tetapi bantuan-bantuan anda tertulis dihati.

Penulis mengetahui bahwa penulisan hukum ini masih kurang dari sempurna dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas. *Last but not least*, diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun. “Sehat dan sukses selalu”

Yogyakarta, Oktober 2012

Penulis

Hagni Kumboro Bhakti



ABSTRACT

Cocerning the efforts to prosperous its citizenry, Indonesia has done several things involve regulation, supervision and economical control appropriate with the Act of 1945 Article 33. The needed fund resources to prosperous its citizenry is from the tax and the other legal excise, which the implementation is given to the General Exice Tax Directorate under the authority of Chancellor of the Exchequer.

The duty and the function of the general Exice Tax Directorate are not only to do input tax, excise collection, or the other collection, but also to do a series of an injustice smuggling investigation. The investigation of injustice smuggling is done considering the extent number of violation in importing goods from overseas countries and exporting goods from the country to the overseas countries

The government always makes serious effort in order to overcome the smuggling which damage the country. The eradication of smuggling will lead to the country's goal written in Act of 1945 that is to put forward the general prosperity

Keywords: Smuggling, Government, Investigation



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Isi Skripsi	10
BAB II : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Serta Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan	12
A. Penyidik Dalam Peradilan Pidana	12
1. Penyidik Polri	12

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	14
B. Pengertian Tindak Pidana dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	
Penyelundupan	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. PengetianTindak Pidana Penyelundupan dan Bentuk-Bentuk.....	
Tindak Pidana Penyelundupan	18
C. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana	
Penyelundupan	26
1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	26
2. Keberadaan Tindak Pidana Penyelundupan.....	34
3. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan	39
BAB III : PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA